

## Kesepakatan mengenai referendum di Timor-Leste

Celestino Boavida Pereira

### Latar Belakang

Berdirinya negara baru yang bernama *Timor-Leste* di awal abad XXI ini karena adanya kebijakan pemerintah Indonesia menempati kesepakatan 5 Mei 1999 di *New York* yang berisi 7 butir kesepakatan yang di tanda tangan antar Indonesia dan Portugal di saksikan oleh Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Kofi A. Annan, antara lain:

1. Meminta Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengajukan rangsangan kerangka konstitusional yang mengatur tentang suatu otonomi khusus bagi Timor-Leste dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang bertimbangannya melalui jajak pendapat; 2. Meminta Sekretaris Jenderal untuk menempatkan kesepakatan, segera setelah penanda tangan penentuan pendapat tersebut secara efektif; 3. Bagi pemerintah Indonesia bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan di Timor-Leste selama proses jajak pendapat, agar penentuan pendapat dilaksanakan secara adil dan damai dari suasana yang bebas dari intimidasi serta tanpa campur tangan dari pihak ketiga; 4. Diharapkan agar Sekretaris Jenderal PBB menyampaikan hasil penentuan pendapat kepada Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB serta diinformasikan kepada Indonesia, Portugal dan rakyat Timor-Leste; 5. Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langka konstitusional bagi otonomi khusus daerah Timor-Leste, dan bagi Portugal harus menempuh prosedur di PBB untuk mengeluarkan masalah Timor-Leste dari daftar agenda majelis umum PBB, bila rakyat Timor-Leste memilih otonomi khusus; 6. Jika kerangka otonomi khusus yang diusulkan tidak di terima rakyat Timor-Leste maka pemerintah Indonesia berjanji, akan mengambil langkah-langkah konstitusional yang diperlukan, untuk memindahkan kekuasaan Timor-Leste kepada PBB secara tertib dan damai, berdasarkan hukum Indonesia, serta statusnya kembali seperti sebelum 17 juli 1976, untuk menuju proses kemerdekaan sendiri; 7. Selama jajak pendapat berjalan di minta kepada PBB untuk menghindari misi keamanan di Timor-Leste untuk menjaga ketertiban antara kedua kelompok rakyat di Timor-Leste (<http://www.un.org>).

Kebijakan pemerintah Indonesia memberi dua opsi kepada rakyat *Timor-Leste* sebagai jalan keluar untuk menentukan pilihannya sendiri (Kesaksian, 2002). Pada tahun 1999, penyelesaian masalah *Timor-Leste* tidak lagi berstandar pada proposisi bahwa integrasi sudah final dan tidak dapat lagi diganggu gugat. Berarti mempertahankan integrasi *Timor-Leste* bukan lagi merupakan kepentingan nasional Indonesia. Pada awal integrasi *Timor-Leste* ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia, diplomasi Indonesia banyak sekali dilakukan oleh para elit yang mendukung integrasi. Sejak 1976-1980<sup>an</sup> Dalam sidang Majelis Umum Dewan Keamanan PBB selalu mempersoalkan masalah *Timor-Leste* mulai dari tahun 1975 hingga 1982, PBB berulang kali mempersoalkan karena integrasi *Timor-Leste* ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia dianggap menyalahi kaidah hukum internasional.

Periode antara 1975-1982 merupakan masa paling berat bagi diplomasi Indonesia atas masalah *Timor-Leste* namun berdasarkan fakta bahwa ada dukungan internasional terhadap resolusi PBB mengenai kasus *Timor-Leste* di agenda PBB makin lama makin berkurang dari 72 suara di tahun 1975 menjadi 50 suara di tahun 1982 dan dukungan terhadap Indonesia semakin besar yaitu 10 suara di tahun 1975 menjadi 48 suara di tahun 1982. Setelah itu pada tahun 1982 terdapat 50 negara seharusnya ikut memberikan suara mendukung atau menentang masalah *Timor-Leste* di hapus dari agenda PBB tetapi dari 50 negara tersebut 43 negara *abstain* terhadap resolusi PBB 1975 sehingga masalah *Timor-Leste* periode tersebut tidak dibicarakan lagi forum resmi baik regional maupun internasional.

Indonesia selalu mengatakan bahwa rakyat *Timor-Leste* telah memilih bergabung dengan Indonesia yang ditegaskan oleh deklarasi Balibo, namun para diplomat *Timor-Leste* yang ada di luar negeri tetap melobi masyarakat internasional, Portugal agar tetap mendesak PBB untuk meminta Indonesia keluar dari Timor-Timur. Tercatat antara 1975 hingga 1976, PBB telah mengeluarkan resolusi tentang masalah Timor-Timur, sebanyak 5 resolusi (Singh, 1998).

Pada tahun 1983 pemerintah Indonesia mendesak Sekjen PBB untuk menghapus masalah Timor-Timur dari agenda Dewan Keamanan PBB tetapi PBB tidak menanggapi permintaan tersebut hingga masalah Timor-Timur tidak terhapus dari agenda PBB. Maka kelompok pejuang kemerdekaan dari sayap

diplomasi, sayap gerakan bawah tanah dan sayap angkatan bersenjata FALINTIL semakin melakukan berbagai siasat perjuangannya sampai masalah Timor-Timur nampak hingga pada proses terjadinya peristiwa berdarah Santa Cruz 12 November 1991 (Gusmão 2000), yang menjadikan perjuangan diplomasi Indonesia gagal total, dan rasa simpati dunia internasional kepada Timor-Timur semakin meningkat setelah tragedi Santar Cruz.

Pada tahun 1997 di saat negara Indonesia menghapi krisis moneter, Amerika sebagai patner utama Indonesia ini tidak mau membantu mencairkan dana dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional untuk memulihkan nilai rupiah yang merosot dalam waktu yang singkat, sehingga timbul krisis politik, ekonomi dan sosial budaya dalam negeri Indonesia dan Soeharto pun lengser dari jabatannya. Setelah pergantian pemimpin dari Soeharto kepada Habibie, stabilitas tetap tidak menentu sehingga Habibie memberi dua opsi (Otonoi atau Kemerdekaan) sebagai respon atas tuntutan linglungan dalam dan luar negeri. Masalah Timor-Timur yang selama itu di agenda PBB yang hanya diperdebatkan antara Indonesia dan Portugal serta PBB itu harus diserahkan kepada rakyat Timor-Timur untuk menentukan pilihannya.

### **Rumusan masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 'Mengapa pemerintah Indonesia mengajukan dua opsi pada kesepakatan 5 Mei 1999 di New York?'

### **Metode penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana berusaha untuk menggambarkan fenomena sosial yang diteliti. Artinya untuk menggambarkan dan mengeksplorasi mengenai dua opsi yang diajukan Indonesia sebagai dasar kesepakatan 5 Mei 1999 antara pemerintah Indonesia, dan pemerintah portugal serta PBB di *New York*.

Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### *a. Observasi*

Observasi lapangan merupakan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui secara lebih dekat fenomena sosial yang diteliti agar peneliti mempunyai pengalaman secara langsung dengan fenomena yang diteliti.

Pengamatan langsung ini memungkinkan peneliti untuk bisa melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya (Lexi J. Moleong, 2002). Dalam penelitian ini penulis mengamati hal-hal yang berhubungan dengan penyebab terjadinya kesepakatan dan dampak dari kedua opsi tersebut.

#### *b. Wawancara*

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara mendalam antara peneliti dengan informan kunci dan informan-informan lainnya tentang fenomena yang sedang diteliti untuk memperoleh data yang benar dan terperinci. Hal-hal yang ditanyakan *key informant* lebih pada alasan munculnya kesepakatan dan dampaknya.

#### *c. Penyalinan data sekunder*

Dalam penelitian ini penulis menyalin data sekunder dari kepustakaan yang tersedia berkaitan dengan fenomena sosial yang diteliti.

#### *d. Studi dokumentasi*

Studi dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara melihat, mengamati dan mengkaji dokumen-dokumen yang ada sebagai faktor pendukung terhadap data yang sudah dikumpulkan dengan metode lainnya. Sedangkan teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman 1992, 20). Kedua ahli ini mengemukakan empat hal utama dalam proses penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk lebih jelas dapat di lihat gambar

di bawah ini.

## **Pembahasan**

Perang dingin dan perebutan pengaruh kekuasaan antara Amerika dan Uni Soviet di berbagai belahan dunia nampaknya menjalar sampai di Timor-Timur sehingga menimbulkan perang saudara yang mengundang Indonesia hadir di Timor-Timur. Intervensi militer Indonesia atas Timor-Leste karena Amerika merasa kepentingannya di kawasan Asia Tenggara terganggu sehingga Amerika memberikan lampu hijau kepada Indonesia untuk menduduki Timor-Timur pada tanggal 7 Desember 1975.

Setelah Tentara Nasional Indonesia (TNI) invasi Timor-Timur maka pada 7 Juli 1978 melalui sidang istimewa MPR RI/MPR/N.6/1976, mengesahkan integrasi Timor-Timur ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia dan merupakan provinsi ke-27 yang sudah merupakan negara kedaulatan Republik Indonesia sehingga pemerintah Indonesia mulai menjalankan roda pembangunan di berbagai bidang di Timor-Timur dengan menggunakan pendekatan militer dari tingkat nasional sampai tingkat desa bahkan kampung. Pembangunan melalui pendekatan militer maka sering terjadi tindakan yang dianggap kriminal seperti adanya korban pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan fisik ketika orang Timor-Timur dicurangi melakukan kontak dengan FALINTIL termasuk pembunuhan massal salah satunya seperti insiden Cararas di kabupaten Viqueque (Aditjondro, 1999)

Militer Indonesia melakukan berbagai usaha untuk melumpuhkan semua jalur pergerakan perjuangan kemerdekaan Timor-Timur tetapi dengan perjuangan yang gigih serta inspirasi makna semboyan merdeka atau mati dan watak nasionalisme yang tangguh yang membuat para pejuang kemerdekaan Timor-Timur selalu mencari alternatif untuk menyusun siasat perlawanan demi mencapai kemerdekaan.

Perubahan demi perubahan siasat politik dilakukan oleh pejuang kemerdekaan Timor-Timur antara lain: *Conselho Nacional Revolucionaria da Resistência Maubere (CNRR)* (Gusmão 2001, 68) telah tersudut tidak lagi sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan jaman akhirnya berubah lagi menjadi *Conselho Nacional Resistência Timorese (CNRT)* yang mengantarkan Timor-Timur pada kemerdekaan total melalui jajak pendapat.

Masalah pelanggaran hak azasi manusia di seluruh wilayah Indonesia selama pemerintahan orde baru selalu saja terjadi setiap detik tetapi karena kuatnya sistem sehingga hal tersebut dianggap biasa-biasa saja dan hal yang sama juga terjadi di Timor-Timur selama 24 tahun pendudukan rezim rezim militer Soeharto tetapi karena sistem kerja sama Indonesia dengan organisasi baik regional maupun internasional adalah kuat maka apapun yang terjadi di Timor-Timur menyangkut bentuk pelanggaran hak asasi manusia tetap dianggap masalah dalam negeri Indonesia bahkan insiden Santa Cruz pemerintah Indonesia mengatakan demikian. Timor-Timur selama itu merupakan satu di antara sumber kelemahan nasional Indonesia sebab secara politik dunia internasional tidak mengakui integrasi Timor-Timur ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia maka Portugal dan dunia barat selalu mengkampanyekan pelanggaran hak azasi di Timor-Timur yang di tuduh kepada tentara nasional Indonesia dan polisi Republik Indonesia, akibatnya kredibilitas Indonesia di mata dunia internasional jatuh.

Setelah melakukan berbagai pertimbangan, pemerintah Indonesia akhirnya mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah Timor-Timur maka dikeluarkanlah opsi II sebagai usaha mengangkat citra pemerintah Indonesia di mata dunia internasional. Oleh sebab itu presiden Habibie mengadakan pertemuan kabinet dan merumuskan daerah otonomi khusus atau memilih merdeka (STL 21 Januari 1999). Pengumuman kedua opsi tersebut sekaligus sebagai tanda penyerahan Timor-Timur kepada PBB. PBB dan Portugal sebagai pihak yang berkepentingan di Timor-Timur untuk turut memperlancara proses penyelesaian masalah Timor-Timur melalui jajak pendapat. Maka Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi 1246 yang memberikan mandat kepada *United Nations Administrations Mission in East Timor* selaku organ PBB yang berhak menyelenggarakan jajak pendapat di Timor-Leste yang hasilnya dimenangkan oleh pihak pro-kemerdekaan sebanyak 79% dan pihak pro-integrasi hanya 21%.

## **Daftar Pustaka**

- Aditjondro, G, 1999, *Politik Minyak di Balik Tragedy Timor Lorosa'e*, SOLIDAMOR, Indonesia  
Gusmão, S da G, 2001, *Menyongsong Tahun Pembebasan*, Sahem Intitut for Liberation, Dili  
Singh Bilveer, 1998, *Timor-Timur Indonesia dan Dunia, Mitos dan Kenyataan*, Jakarta